

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dibidang pertanian adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena pada umumnya dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang besar serta sumberdaya alam yang masih banyak belum diolah. Pembangunan disektor pertanian sangat penting karena sebagian besar masyarakat di Indonesia sangat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Pengembangan agribisnis sektor perkebunan di Indonesia telah memberikan dampak yang sangat positif dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penghasil devisa negara dari sektor non-migas.

Salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia adalah kelapa sawit. Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) merupakan tanaman perkebunan penting penghasil minyak makanan, minyak industri maupun bahan bakar nabati. Kelapa sawit juga salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar dunia. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait perkebunan kelapa sawit dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat, penyerapan tenaga kerja, dan sumber devisa negara.

Prospek perkembangan industri kelapa sawit saat ini sangat pesat dimana terjadi peningkatan baik luas areal maupun produksi kelapa sawit seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pada Tahun 2018, luas areal perkebunan kelapa sawit tercatat mencapai 14.326.350 hektar. Dari luas tersebut, sebagian

besar diusahakan oleh perusahaan besar swasta (PBS) yaitu sebesar 55,09% atau seluas 7.892.706 hektar. Perkebunan Rakyat (PR) menempati posisi kedua dalam kontribusinya terhadap total luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia yaitu seluas 5.818.888 hektar atau 40,62% sedangkan sebagian kecil diusahakan oleh Perkebunan Besar Negara (PBN) yaitu 614.756 hektar atau 4,29%. (Direktor Jenderal Perkebunan, 2020).

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi penyumbang komoditi perkebunan di Indonesia. Sebagian besar penduduk Provinsi Jambi tinggal di daerah pedesaan dengan mata pencarian utama pada sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit yang dapat meningkatkan ekonomi daerah. Perkembangan luas areal, produksi dan produktivitas kelapa sawit di Provinsi Jambi dapat dilihat Tabel 1.

Tabel 1. Luas Areal, Produksi dalam CPO dan Produktivitas Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021

Tahun	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2017	663.500	1.435.141	2,16
2018	768.022	1.183.033	2,32
2019	1.032.145	2.691.270	2,61
2020	1.041.434	2.884.406	2,77
2021	1.074.600	3.022.600	2,81

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Jambi 2016-2020

Table 1 menunjukkan bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir yaitu sejak tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,19% dan laju pertumbuhan produksi kelapa sawit sebesar 4,47%, untuk produktivitas dari tahun 2017 hingga 2021 laju pertumbuhannya hanya 3,38%. Pengembangan kelapa sawit di Jambi berdampak positif dalam perekonomian dan berperan dalam penyerapan tenaga kerja.

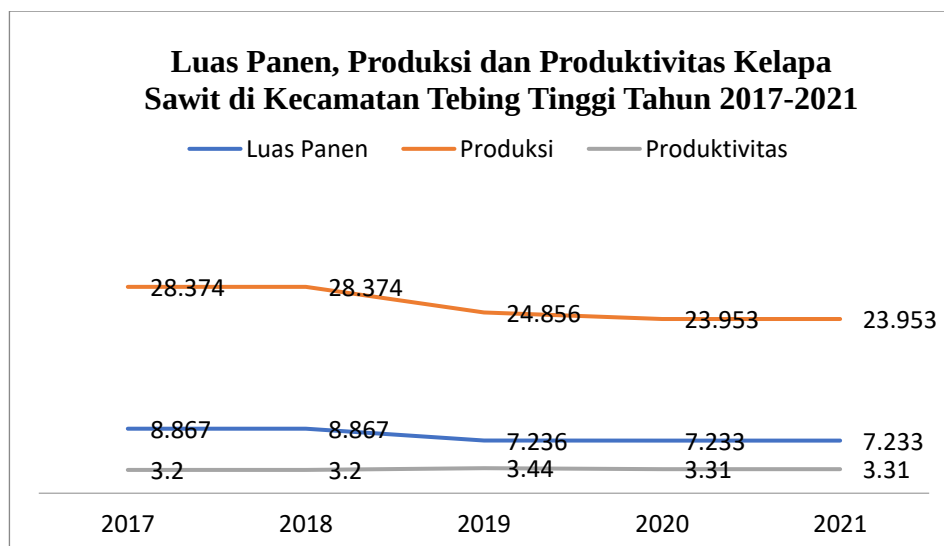
Perkebunan kelapa sawit menjadi komoditas unggulan di Provinsi Jambi yang diusahakan hanya sembilan Kabupaten yaitu Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kerinci. Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu sentra perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi yang memiliki luas areal ke dua setelah Muaro Jambi. Adapun luas areal, produksi dan produktivitas kelapa sawit menurut kabupaten dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit Menurut Kabupaten di Provinsi Jambi Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Kerinci	84,00	14,00	0,16
2	Merangin	71.125,00	217.150,00	3,05
3	Sarolangun	37.495,00	54.271,00	1,44
4	Batang Hari	53.152,00	140.905,00	2,65
5	Muaro Jambi	136.404,98	232.725,00	1,70
6	Tanjung Jabung Timur	33.872,00	76.378,00	2,25
7	Tanjung Jabung Barat	72.769,00	119.510,00	2,05
8	Tebo	60.985,15	118.677,60	1,49
9	Bungo	64.834,00	104.047,00	1,60
Jumlah		530.721,96	1.063.677,60	16,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2022

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki jumlah luas areal mencapai 72.769 ha atau 13,71% dari total luas lahan kelapa sawit rakyat dengan jumlah produksi sebanyak 119.510 ton atau 11,23% dan jumlah produktivitas sebesar 2,05 ton/ha atau sebesar 12,5%. Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam kabupaten yang memiliki luas panen yang besar. Sehingga menunjukkan bahwa kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki potensi yang sangat baik. Lampiran 1 menunjukkan bahwa persebaran luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 13 Kecamatan. Kecamatan Tebing Tinggi merupakan kecamatan dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar ke tiga yaitu sebesar 7.233 ha. Adapun data luas panen, produksi dan produktivitas Kecamatan Tebing Tinggi tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2017- 2021

Gambar 1 menunjukkan bahwa data luas panen, produksi dan produktivitas kelapa sawit mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 dengan luas panen 7.233 ha, dengan produksi sebesar 23.953 ton, sehingga produktivitas di Kecamatan Tebing Tinggi adalah 3,31 ton/ha dan lebih tinggi dari produktivitas di Kecamatan Batang Asam yang memiliki luas areal terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan demikian petani yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi memiliki potensi produksi dan produktivitas yang baik dari kecamatan lain yang berada di Kabupaten Tanjung jabung Barat.

Perkebunan kelapa sawit rakyat dilaksanakan melalui beberapa pola, antara lain pola plasma dan pola swadaya. Petani plasma adalah petani yang mengelola sendiri dan memiliki hubungan kemitraan dengan perusahaan perkebunan. Pola plasma dalam mengelola kebun sawit lebih baik dibandingkan petani mandiri lantaran petani plasma ada kerjasama dengan perusahaan inti. Petani swadaya merupakan petani yang membudidayakan kelapa sawit mandiri tidak memiliki kemitraan dengan pihak lain, sumber pendanaan dan pengelolaan sendiri, tidak terikat dengan pabrik manapun, tidak mendapat pendampingan dalam teknik budidaya yang benar sehingga kualitas dan kuantitas masih diragukan.

Pendapatan petani kelapa sawit di Kecamatan Tebing Tinggi dipengaruhi oleh harga, luas lahan serta biaya produksi yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Harga jual kelapa sawit di daerah penelitian berkisaran dari Rp 1.300- Rp 2.200, harga jual kelapa sawit mengalami fluktuasi mengikuti besarnya produksi dilapangan. Harga jual kelapa sawit akan mengalami peningkatan pada saat bulan tertentu dimana produksi kelapa sawit sedang mengalami masa trek. Selain itu luas lahan pertanian juga merupakan salah satu penentu dari pengaruh faktor produksi komoditas pertanian, sehingga semakin luas lahan yang diusahakan maka semakin besar pula hasil produksi yang didapatkan. Selain berusahatani kelapa sawit sebagian petani sampel juga memiliki beberapa usaha sampingan seperti dibidang perdagangan, pegawai, usaha jasa dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan luas lahan dan sumber pendapatan tersebut akan menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat total pendapatan yang diterima oleh setiap petani sampel. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam pendistribusian pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik kebutuhan pangan maupun non pangan sehingga terjadi ketimpangan pendapatan pada petani kelapa sawit pola swadaya.

Masalah pemerataan pendapatan masyarakat menjadi salah satu hal yang penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah, karena tidak dapat dipungkiri hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini belum dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah bagi masyarakat daerah pedesaan. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Pertumbuhan ekonomi akan lebih bermakna apabila dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata yang sering diikuti dengan perubahan struktur pendapatan (Tambunan, 2001).

Distribusi pendapatan petani kelapa sawit di Kecamatan Tebing Tinggi tergolong rendah yang berarti bahwa distribusi pendapatan di Kecamatan Tebing Tinggi relatif merata. Ada banyak penelitian menyebut bahwa ketidakmerataan rendah terjadi karena luas lahan yang digunakan petani tidak mengalami perbedaan yang sangat jauh. Untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan distribusi di suatu wilayah maka menggunakan alat analisis yaitu rasio gini dan Kurva Lorenz. Dimana penilaian tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan tersebut apabila mempunyai nilai indeks gini sebesar 0,4 atau dibawahnya, menunjukkan ketimpangan yang rendah, sebaliknya apabila mempunyai nilai indeks gini di atas 0,4 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Keunggulan dari koefisien gini yaitu, koefisien memenuhi empat aksioma dari pengukuran ketimpangan, yaitu prinsip transfer Pigou-Dalton, prinsip independensi skala pendapatan, prinsip anonymity dan prinsip independensi populasi. Koefisien gini dapat digunakan untuk membandingkan distribusi pendapatan yang berbeda dari berbagai kelompok populasi, baik antar negara maupun antar wilayah dan jenis pengukuran dalam bentuk rasio. Koefisien gini tidak rumit dan mudah untuk dipahami, sehingga mudah digunakan untuk menggambarkan bagaimana perubahan distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Ketimpangan pembagian pendapatan termasuk fenomena sosial ekonomi di daerah pedesaan. Pertumbuhan pendapatan yang tinggi, harus terdistribusi secara merata pada penduduk agar tidak ada perbedaan kesenjangan yang besar antara yang kaya dan yang miskin. Ketimpangan pendapatan disebabkan oleh adanya penurunan distribusi pendapatan maka akan mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya setiap ada kenaikan pertumbuhan ekonomi maka akan menyebabkan penurunan distribusi pendapatan. Perbedaan

itulah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sehingga diperlukan usaha dalam pembangunan ekonomi agar tercipta pertumbuhan yang setinggi-tingginya, dan juga menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran.

Tingkat pendapatan yang relatif rendah dapat mendorong petani untuk mencari alternatif sumber pendapatan lain karena ketidakcukupan pendapatan tersebut dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dengan melakukan usahatani bukan kelapa sawit maupun dengan meningkatkan alokasi curahan tenaga kerja di luar usahatani dan di luar pertanian yang akan berpengaruh terhadap pendistribusian pendapatan rumah tangga petani. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah bagi masyarakat daerah pedesaan. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Ketimpangan pendapatan disebabkan oleh adanya penurunan distribusi pendapatan maka akan mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya setiap ada kenaikan pertumbuhan ekonomi maka akan menyebabkan penurunan distribusi pendapatan. Perbedaan itulah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sehingga diperlukan usaha dalam pembangunan ekonomi agar tercipta pertumbuhan setinggi-tingginya, dan juga menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian yang menganalisis distribusi pendapatan untuk melihat ketimpangan pendapatan usahatani kelapa sawit.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berapakah besarnya tingkat pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjug Jabung Barat ?

2. Bagimanakah distribusi pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis besarnya tingkat pendapatan petani kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Menganalisis distribusi pendapatan petani kelapa sawit pola swadaya di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan ataupun rujukan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian ini
2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai analisis distribusi pendapatan rumah tangga petani kelapa sawit.